



UNIVERSITAS INDONESIA

**POLITIK HUKUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI INDONESIA
SEJAK MASA TRANSISI POLITIK 1998 SAMPAI DENGAN
TAHUN 2008**

TESIS

NAMA : ABDI KURNIA D
NPM : 0806424844

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM KENEGARAAN**

**JAKARTA
JULI 2010**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Abdi Kurnia D

NPM : 0806424844

Program Studi : Hukum Kenegaraan

Judul Tesis : Politik Hukum Kerukunan Umat Beragama di
Indonesia sejak Masa Transisi Politik (1998)
sampai dengan Tahun 2008

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof.Dr. Ramly Hutabarat,S.H.,M.Hum (.....)

Penguji : Prof.Dr.Satya Arinanto,S.H.,M.H. (.....)

Penguji : Prof.Dr.Uswatun Hasanah,M.A. (.....)

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal : 28 Juni 2010



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ABDI KURNIA D

NPM : 0806424844

Tanda Tangan :

Tanggal : 28 Juni 2010

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDI KURNIA D

NPM : 0806424844

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**POLITIK HUKUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA
SEJAK MASA TRANSISI POLITIK 1998 SAMPAI DENGAN TAHUN 2008**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : JAKARTA

Pada tanggal : 28 JUNI 2010

Yang menyatakan

(ABDI KURNIA D)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam nikmat, antara lain nikmat kemudahan di dalam menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tesis ini berangkat dari asumsi penulis bahwa kerukunan umat beragama merupakan pilar terpenting yang menguatkan keutuhan bangsa. Dunia menunjukkan bagaimana ketidakmampuan negara dalam memelihara kerukunan umat beragama menyebabkan pecahnya negara tersebut. Negara-negara seperti Yugoslavia, Kosovo, dan Rusia-Chechnya merupakan contoh negara-negara yang terpecah akibat ketidakmampuan mengelola keragaman agama yang terdapat di dalamnya.

Sebagai negara dengan tingkat kemajemukan paling tinggi di dunia, Indonesia tentu berpotensi mengalami disintegrasi sebagaimana dialami oleh negara-negara tersebut. Konflik horisontal antarumat beragama dalam kurun 40 tahun terakhir—terhitung sejak tahun 1967—menghiasi wajah hubungan antaragama di Indonesia. Dilacak ke akar penyebabnya, politik hukum pemerintah merupakan masalah pokok dalam penciptaan kerukunan umat beragama tersebut.

Politik hukum dikatakan sebagai masalah pokok karena politik hukum sesungguhnya menggambarkan ikhtiar pemerintah untuk menciptakan harmonisasi kehidupan umat beragama. Selain itu, politik hukum menggambarkan kehendak politik (*political will*) rezim yang berkuasa dalam membina kehidupan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi dan hak-hak asasi manusia.

Sebagai sebuah kajian ilmiah, tulisan ini mencoba membandingkan produk peraturan perundang-undangan yang terbit mengenai kerukunan umat beragama dari setiap rezim yang berkuasa, terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan 2008. Upaya memahami, mendalami, dan mengkomparasi jelas bukan pekerjaan yang mudah. Karena itu, penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Ramly Hutabarat,S.H.,M.Hum, yang sudi meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau di Kementerian Hukum dan HAM untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

2. Bapak Prof.Dr.Satya Arinanto,S.H.,M.H, yang sudi membaca proposal tesis yang penulis ajukan untuk selanjutnya diarahkan kepada pembimbing penulis;
3. Bapak Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H.,M.H, yang sudi memberikan pencerahan kepada penulis ketika mengikuti kuliah Hukum Konstitusi;
4. Ibu Prof.Dr.Uswatun Hasanah,M.A. yang telah menyediakan waktunya untuk menguji tesis penulis.
5. Bapak Prof. Safrie Nugraha, S.H., LL.M. Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Pimpinan Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI;
7. para pengajar;
8. Para staf administratif yang telah membantu kelancaran administrasi penulisan ini;
9. Para senior penulis di HMI Komisariat Fakultas Hukum UI dan KALAM UI, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi;
10. Kedua orang tua penulis, Drs. H.M.Djohan Abidin dan Hj. Mulyati, adik-adik, Diana Hilmayani, Eva Trisfaidah, Munzalina, dan Maulidia, yang selalu mendukung dengan doa, isteri, Yuliana J.Abdi dan anak-anak penulis, Wildan, Gilman, dan Bilqisth, yang dengan rela menerima keadaan selama penulis menyelesaikan kuliah pascasarjana; dan
11. Keluarga besar isteri di Sulawesi Tenggara yang selalu memberi dukungan moral kepada penulis dan keluarga.

Perlu penulis sampaikan di sini bahwa menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah untuk level pendidikan tinggi program pasca sarjana ini jelas bukan pekerjaan yang mudah. Tidak saja dibutuhkan bekal ilmu untuk menganalisis permasalahan yang dikaji, tapi juga kesabaran di dalam menjalankannya. Hambatan dan kendala di dalam menyelesaikan tugas akhir, seperti tesis ini tentu dialami oleh sebagian besar mereka yang melakukannya, tidak terkecuali bagi penulis. Bagi penulis yang merupakan seorang anak guru Sekolah Dasar Negeri, yang bertugas pada masa pemerintahan Orde Baru, dengan kendala ekonomi yang

besar, dapat menyelesaikan tugas akhir seperti tesis jelas merupakan sebuah kebanggaan dan mukjizat. Dikatakan sebagai kebanggaan karena dari kalangan keluarga besar penulis, baru penulis-lah yang dapat mengikuti kuliah di jenjang strata-2 (S-2). Dikatakan mukjizat, karena sejak mendaftarkan diri ke Program Pascasarjana Fakultas Hukum tidak pernah terbayang di benak pikiran penulis akan dapat menyelesaikan studi dengan biaya pendidikan yang terbilang mahal di Negara ini. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa benarlah apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, "*wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wayarzuqhu min haitsu laa yahtasib*" (siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dan Dia akan member rezeki dari arah yang tidak diduga).



ABSTRAK

Nama : ABDI KURNIA D

Program Studi: ILMU HUKUM

Judul : Politik Hukum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Sejak
Masa Transisi Politik 1998 Sampai Dengan Tahun 2008

Tesis ini membahas politik hukum kerukunan umat beragama oleh rezim-rezim yang berkuasa di Indonesia sejak Tahun 1998 sampai dengan 2008. Pengamatan terhadap model-model politik hukum yang digunakan oleh setiap rezim tersebut dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana proses demokratisasi menyentuh persoalan yang lebih esensial di dalam kehidupan masyarakat, yaitu persoalan kerukunan umat beragama. Sebagaimana dikemukakan oleh Hussein Umar, mantan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia, kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pemeliharaan kerukunan umat beragama sangat bergantung kepada sikap tegas Negara, di dalam kaitan ini terutama Pemerintah atau Rezim Politik yang berkuasa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah mendorong segera diterbitkannya sebuah undang-undang yang mengatur kerukunan umat beragama, yang dengannya umat beragama benar-benar memperoleh jaminan kemerdekaan di dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.

Kata kunci: *politik hukum, kerukunan umat beragama, dan penyebaran ajaran agama.*

ABSTRACT

Name : ABDI KURNIA D

Study Program: Law

Title : Legal Politics of Religious Harmony in Indonesia since Political Transition from 1998 until 2008

This thesis studies legal policy of religious harmony amongst believers by the ruling regimes in Indonesia since the year 1998 until 2008. Observation of the legal political models used by each regime was performed to measure the extent of the democratization process which is more essential matters touched on in the life of society, namely the issue of religious harmony. As stated by Hussein Umar, a former Chairman of the Board of Da'wa Islamiyya Indonesia, religious harmony is one of important pillars in maintaining the integrity of the nation and the country of Indonesia. Such effort is depend on the State assertiveness, in this connection especially the government or the ruling political regime. This research is a normative law research. The result of this study suggested that the government should encourage the immediate issuance of a law regulating religious harmony, by which religious people actually obtain assurance of independence in carrying out religious activities.

Keywords: politics of law, religious harmony, and the spread of religious teachings.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
Bab I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Perumusan Permasalahan.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
Bab II : TINJAUAN TEORITIS.....	21
A. Konstruksi Hubungan Politik dan Hukum.....	21
B. Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial.....	24
C. Kontrol Sosial dan Hak Asasi Manusia.....	29
D. Hukum Responsif.....	33
E. Hubungannya dengan Kerukunan Umat Beragama.....	42

**Bab III : POLITIK HUKUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI INDONESIA.....45**

A. Akar Masalah Kerukunan Umat Beragama.....	45
B. Peran Negara.....	50
C. Disain Kebijakan Orde Baru tentang Kerukunan Umat Beragama.....	55
D. Masa Pemerintahan Habibie (1998-1999).....	61
E. Masa Abdurrahman Wahid (1999-2001).....	67
F. Masa Megawati Soekarnoputri (2001-2004).....	72
G. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Jilid I (2004-2009).....	74

**Bab IV ANALISIS DAN PERBANDINGAN POLITIK HUKUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

DI BERBAGAI NEGARA	80
A. Analisis Tentang Kerukunan Umat Beragama Saat Ini.....	80
1. Malaysia.....	86
2 Thailand.....	88
3. Republik Rakyat China.....	89
4 .Saudi Arabia.....	91
5 Amerika Serikat.....	92
6. Inggris.....	96

Bab V : PENUTUP.....98

A. Simpulan.....98

B. Saran.....100

Daftar Pustaka

